

# Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina

## *The Involvement of the Indonesian Government in The Peace Process of Israeli-Palestinian Conflict*

Mayjen TNI (Purn) I Gede Sumertha KY, PSC, Kol. Inf. Dr. Ahwan Ismadi, S.Pd.I., S.H., M.H.,

Hilaria Ananda Wibowo

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

**Abstrak** - Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan belum dapat diselesaikan walaupun sudah melibatkan banyak negara untuk mendorong terlaksananya proses perdamaian. PBB pun turut terlibat dengan mengeluarkan berbagai resolusi untuk mengakhiri konflik namun solusi damai belum dapat dilaksanakan. Indonesia sebagai sebuah negara yang mendukung perdamaian dunia melalui penyelesaian konflik Israel-Palestina, memiliki dorongan untuk terus terlibat dengan mengedepankan solusi dua negara sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri konflik ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan keterlibatan Pemerintah Indonesia serta kendala yang dihadapi dalam proses perdamaian konflik Israel-Palestina. Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara (*in depth interview*) terhadap narasumber yang terkait dan penentu kebijakan, serta studi pustaka untuk memperkaya analisa data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik pelik, transformasi konflik, diplomasi, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi dasar untuk menganalisa keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam konflik Israel-Palestina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dan berperan secara aktif untuk terlibat dalam konflik Israel-Palestina serta mendukung solusi dua negara dengan mendorong kemerdekaan Palestina walaupun memiliki keterbatasan dan menjumpai sejumlah kendala. Disarankan agar Kemlu terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan membantu rekonsiliasi di dalam negara Palestina itu sendiri, mendukung dan berinisiatif untuk membentuk cara-cara baru dengan mengundang aktor-aktor baru untuk turut terlibat dalam proses perdamaian Israel-Palestina, serta meningkatkan negosiasi informal dengan Israel.

**Kata kunci:** Keterlibatan, Pemerintah Indonesia, Indonesia, Konflik Israel-Palestina

**Abstract** - *Israeli-Palestinian conflict is a conflict that has lasted for decades and cannot be resolved even though it involves many parties to encourage the implementation of the peace process. Not only countries, United Nations was involves by issuing resolution to end*

*the conflict but an amicable solution cannot be implemented yet. As a country that supports world peace through ending the conflict within Israel and Palestine, Indonesia has the urge to engage with the two-state solution as a best solution. The aim of this research is to analyze and describe the involvement of the Indonesian Government and its obstacle facing the peace process of Israeli-Palestinian conflict. Using qualitative methods through an in-depth interview the informant and the policy makers as well as literature to enrich the data analysis. Intractable conflict theory, conflict transformation theory, diplomacy theory, and Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 was applied in this research to analyze the involvement of Indonesian Government in Israeli-Palestinian conflict. The result shows that Indonesian Government has the commitment and actively contribute to involving in the conflict and support the two-state solution although dealing with some obstacles and limitations. Recommendation action to Kemlu is to keep the fight for the independence of Palestine through helping in internal reconciliation, supporting and initiating to make a new method and inviting new actors to support the peace process, and also intensifying negotiations with Israel.*

**Keywords:** *Involvement, Indonesian Government, Indonesia, Israeli-Palestinian Conflict*

## **Pendahuluan**

**D**alam sejarahnya, konflik Israel-Palestina bermula sejak pertengahan tahun 1800an dimana kelompok minoritas Yahudi Eropa mulai merencanakan berdirinya *Jewish homeland* (tanah air bangsa Yahudi). Theodore Herzl, seorang Yahudi kelahiran Hungaria memublikasikan karyanya, *Der Judenstaat*, tahun 1896 yang berisi gagasan pembangunan *Jewish homeland*. Munculnya ketertarikan kelompok Yahudi Eropa terhadap gagasan Herzl inilah yang menjadi penyebab dibentuknya Kongres di Basle Switzerland tahun 1987 atau dikenal sebagai Kongres Zionis Pertama.

Tekanan terhadap bangsa Yahudi di Eropa memperbesar kehendak mereka

untuk keluar dari wilayah Eropa. Pada saat itulah ketegangan antara umat Yahudi yang didominasi oleh kelompok zionis masuk dan masyarakat asli Palestina mulai bereskalasi. Untuk meredakan kondisi saat itu, tahun 1947 Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 181 yang isinya membagi dua antara negara Arab dan negara Yahudi di tanah Palestina atau dikenal dengan *Partition Plan*. Resolusi 181 dan deklarasi kemerdekaan bangsa Israel menghantarkan pada eskalasi konflik yang lebih besar. Konflik bangsa Arab meluas tidak hanya pada rakyat Palestina namun pada bangsa Arab lainnya seperti Mesir, Jordania, Suriah dan Libanon melawan Israel yang pecah menjadi

Perang Enam Hari pada 5 hingga 10 Juni 1967.

Dampak dari perang tersebut adalah Israel menduduki sejumlah wilayah yang tadinya dikuasai oleh bangsa Arab. Wilayah-wilayah yang direbut oleh Israel didominasi oleh penduduk Arab Palestina. Pada tahun yang sama dikeluarkan Resolusi 242 yang isinya desakan bagi Israel untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah yang diduduki dan terciptanya formula *Land for Peace*. Lebih dari penarikan mundur, dalam Resolusi 242 secara implisit mendesak Palestina untuk mengakui eksistensi negara Israel.

Pada kenyataannya, apa yang terjadi hingga saat ini berbeda dengan syarat saat Perjanjian Balfour dikeluarkan, yaitu agar tidak ada hal-hal yang mengganggu atau merugikan komunitas asal (bangsa Palestina). Bahkan mereka juga mempersiapkan angkatan bersenjata jika diperlukan untuk membangun negara Yahudi di tanah Palestina yang kemudian bernama *Israeli Defense Forces (IDF)*. Menanggapi aksi Israel tersebut, maka masyarakat Palestina yakni para pemudanya menggelar *Intifada* dengan mengerahkan *Palestine Liberation Organization (PLO)* pada tahun 1987 yang membuat wilayah Palestina yang diperebutkan menjadi arena pertempuran

Israel-Palestina. PLO merupakan satu-satunya organisasi di Palestina yang diakui oleh PBB. Lebih lanjut, PLO selalu mengedepankan cara-cara diplomatis namun juga memiliki sayap militer. Dinamika eskalasi konflik terbuka terjadi hingga saat ini. *Intifada* telah terjadi sebanyak dua kali, perang dan agresi militer juga tidak dapat dihindari sehingga semakin sulitnya menciptakan perdamaian di wilayah tersebut.

Konflik antara Israel-Palestina merupakan konflik yang sudah berlarut dan melibatkan banyak aspek kehidupan didalamnya sehingga sulit untuk diselesaikan. Berbagai kendala menjadikan konflik ini tak kunjung usai karena dinilai sebagai konflik yang tidak dapat diselesaikan, tidak terkelola, berkepanjangan, kurangnya minat masing-masing pihak untuk menyelesaikan konflik, konflik tidak terurus dengan baik, lebih berfokus pada penyelesaian yang sifatnya sementara bukan permanen, kegagalan dalam penyampaian pesan keadilan menurut kedua belah pihak, kegagalan pimpinan Israel dan Palestina untuk menggalang dukungan publik dan menjalankan strategi yang mengarah pada proses perdamaian, serta ketidakefektifan

mediasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat (Bar-Simon-Tov, 2010:15).

Sebenarnya, setiap konflik dapat dikelola dan diselesaikan melalui proses perdamaian. Konflik yang dikelola dan diselesaikan dengan proses perdamaian dapat membuka peluang untuk mengembangkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik termasuk konflik yang melanda Israel-Palestina. Untuk mencapai perdamaian pada konflik ini dibutuhkan pendekatan dan aktor yang mau berkomitmen untuk melanjutkan proses perdamaian. Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki komitmen untuk turut serta menjaga ketertiban dunia memiliki peluang untuk turut serta menjadi penerus proses perdamaian atas konflik Israel-Palestina.

Berbagai upaya damai telah dilakukan dan diinisiasi oleh berbagai pihak namun upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina masih menemukan kebuntuan. Konflik kembali memanas saat Israel melakukan penyerangan secara sepihak terhadap Palestina pada Juli 2014 di Jalur Gaza. Ratusan masyarakat sipil menjadi korban dengan jumlah terbanyak didominasi oleh masyarakat Palestina. De eskalasi konflik terjadi ketika adanya gencatan senjata sebelum Hari Raya Idul Fitri 1425H, namun

konflik bersenjata tidak berhenti pada saat itu. Hingga kini ketegangan antara penduduk Palestina dan pasukan bersenjata Israel masih terjadi namun tidak dalam skala yang besar.

Indonesia sendiri memiliki keunggulan sebagai negara demokratis yang memiliki jumlah umat Muslim terbesar di dunia. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki relasi yang dekat dengan negara-negara Islam lainnya terutama di Timur Tengah. Selain itu Indonesia juga aktif terlibat dalam berbagai organisasi seperti dalam PBB, Organisasi Konferensi Islam (OKI), serta berbagai organisasi yang sifatnya kerjasama baik bilateral maupun multilateral dengan cakupan kawasan regional maupun inter-regional. Selain dalam organisasi internasional, Indonesia juga terlibat aktif dalam Gerakan Non-Blok (GNB). Bahkan dalam perkembangannya, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dan satu-satunya negara dari Asia Tenggara berhasil masuk dalam organisasi G-20 yang beranggotakan negara-negara yang besar dan berpengaruh dalam perekonomian global.

Implikasi dari keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional terkait dengan konflik Israel-

Palestina adalah dukungan yang diberikan oleh dunia internasional pada kemampuan Indonesia untuk terlibat dalam proses perdamaian konflik ini. Indonesia diundang sebagai salah satu tamu dalam pertemuan yang membahas persiapan konferensi perdamaian Israel-Palestina di Paris, 3 Juni 2016. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan konferensi damai yang dilaksanakan pada 15 Januari 2017 di Paris. Kehadiran Indonesia dalam pertemuan tersebut dapat menunjukkan komitmen untuk membantu mewujudkan perdamaian melalui penyelesaian konflik ini yang terlihat dari seruan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan mengedepankan *two-state solution* atau solusi dua negara sebagai jalan akhir penyelesaian konflik Israel-Palestina pada berbagai pertemuan, diantaranya adalah: *Conference on the Question of Jerusalem* pada 14-16 Desember 2015 di Jakarta dan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (KTT LB OKI) pada 6-7 Maret 2016 di Jakarta.

Dalam keterkaitannya dengan masing-masing pihak, hubungan antara Indonesia dengan Palestina semakin hangat dengan dibukanya Konsulat Kehormatan pada awal tahun 2016 di Ramallah. Hadirnya perwakilan masing-

masing pemerintahan dapat memperlancar hubungan kerjasama dan proses pemberian bantuan yang telah berjalan selama ini. Dilain pihak, hubungan Indonesia dengan Israel pun diwarnai dengan berbagai kerjasama, diantaranya adalah kerjasama dalam bidang fertigasi (fertilisasi dan irigasi, teknologi, ekonomi dan pariwisata), bidang perekonomian dan bidang pertahanan.

Sebagai sebuah solusi konflik bagi Israel dan Palestina, solusi dua negara yang diusulkan oleh PBB dan juga disuarakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia merupakan solusi yang penting untuk diwujudkan karena mengupayakan Israel dan Palestina untuk dapat hidup secara berdampingan. Prasyarat kedua negara dapat hidup secara berdampingan adalah adanya kondisi damai yang dapat dicapai melalui proses perdamaian. Pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat masuk dalam proses damai tanpa adanya kesamaan tingkat kepercayaan, namun kepercayaan juga tidak dapat terbangun tanpa adanya proses damai (Kelman, 2005). Baik sebagai fasilitator, negosiator, mediator, ataupun inisiator proses perdamaian, membangun kepercayaan merupakan langkah yang

perlu dilakukan untuk terlibat secara aktif dalam proses perdamaian.

Secara diplomatik, adanya perwakilan masing-masing negara antara Indonesia dan Palestina menunjukkan adanya kepercayaan keduabelah pihak untuk melaksanakan berbagai hubungan kerjasama. Namun hubungan Indonesia dengan Israel tidak menunjukkan adanya kepercayaan yang dapat dilihat dari ketiadaan hubungan diplomatik. Bahkan secara tegas Pemerintah Indonesia sudah mengambil sikap untuk tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai Israel memberikan kemerdekaan pada Palestina. Dengan ketiadaan kepercayaan dari salah satu pihak maka keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan proses perdamaian tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan demikian, keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam proses perdamaian konflik Israel-Palestina dapat mendukung ketertiban dunia. Dengan kata lain, Pemerintah Indonesia ikut melibatkan diri dalam upaya proses perdamaian sebagai bentuk pelaksanaan pencapaian tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan relasi pada masing-masing negara dan dengan menggunakan

cara-cara efektif untuk mewujudkan kondisi yang lebih damai.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013: 4). Sementara Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang menekankan pada penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap fenomena atau fakta (Moleong, 2006). Berdasarkan kedua definisi diatas maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena masalah yang diangkat berasal dari fenomena sosial dan menarik kesimpulan pada bagian akhir berdasarkan hasil interpretasi fenomena yang dikaitkan dengan teori.

Cara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peristiwa yang terjadi menjadi sebuah masalah sosial. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah dengan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti

menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 2013: 20). Peristiwa yang akan diselidiki pada penelitian ini adalah peristiwa sosial berupa konflik antar negara yang disebabkan karena klaim territorial. Sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang tidak hanya menginterpretasikan data namun juga menganalisis data dengan menggunakan teori dan konsep sebagai alat untuk menganalisis..

### **Pembahasan**

Konflik Israel-Palestina merupakan jenis konflik yang dalam berbagai literatur dikatakan tepat sebagai penggambaran konflik pelik. Kriesbers memberikan tiga penekanan dalam mendefinisikan konflik pelik yakni :

**Pertama,** konflik pelik merupakan konflik yang berlarut dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sejak dikeluarkannya Deklarasi Balfour tahun 1917 dimana deklarasi tersebut mengawali migrasi bangsa Yahudi ke tanah Palestina. Adanya hal ini kemudian memunculkan dinamika eskalasi konflik yang tak berkesudahan, baik konflik dalam tubuh masing-masing pihak seperti konflik yang terjadi antara Hamas dengan Fatah di Palestina, kelompok sayap kanan-kiri di

Israel, konflik antara penduduk Palestina dengan otoritas Israel sendiri, maupun keterlibatan pihak lain dalam konflik ini. Pemerintah Palestina yang dikuasai oleh PLO dengan Fatah dibawahnya seringkali mendapatkan perlawanan dari kelompok Hamas sehingga Jalur Gaza dan Tepi Barat pun dikuasai oleh dua kelompok Palestina yang berbeda, Jalur Gaza dikuasai oleh Hamas dan Tepi Barat dikuasai oleh Fatah.

**Kedua,** menganggap bahwa kelompok lawan sifatnya akan mengancam atau destruktif. Dalam konflik Israel-Palestina dan melihat realita yang terjadi masing-masing pihak tampak berusaha untuk menghancurkan pihak lain. Kondisi yang terjadi di Palestina menunjukkan bahwa adanya upaya dari Israel untuk membuat penduduk Palestina tidak berdaya melalui berbagai peraturan yang dibuat sehingga mereka hidup dalam ketegangan dan kecurigaan mengenai apa yang akan terjadi esok hari. Namun demikian, masyarakat Israel pun juga hidup dalam ketegangan dan kecurigaan terhadap Palestina terutama dari kelompok Hamas yang seringkali tidak dalam kendali otoritas Palestina. Aksi pelemparan batu dan penyerangan terhadap aparat maupun rakyat Israel pun terjadi walau dampak yang diberikan

tidak sebesar yang diderita oleh rakyat Palestina.

**Ketiga,** pihak yang menjadi partisan dan perantara gagal untuk mengakhiri konflik atau mengubah mereka. Fakta yang telah terjadi selama ini adalah berbagai inisiatif untuk membawa konflik Israel-Palestina pada meja perundingan namun belum satu perundingan pun yang dapat mengakhiri konflik ini. Inisiatif datang dari berbagai pihak seperti dibahas menjadi agenda tersendiri dalam sidang PBB, dibuatkan konferensi atau pertemuan antar negara yang secara khusus membahas konflik ini, atau melalui inisiatif sebuah negara yang memiliki komitmen untuk membantu menyelesaikan konflik ini. Inisiatif terbaru datang dari Prancis yang menjadi tuan rumah pelaksanaan konferensi perdamaian di Paris, 15 Januari 2017 dengan menghadirkan 70 negara beserta organisasi internasional dan organisasi kawasan lainnya.

Namun demikian, Israel dan Palestina tidak hadir dalam perundingan namun Prancis mengundang keduanya untuk mendengarkan hasil perundingan. Hasil perundingan yang berisi penegasan atas solusi dua negara bagi penyelesaian konflik Israel-Palestina menambah kegeraman Israel setelah DK PBB

mengeluarkan resolusi yang mengilegalkan pembangunan pemukiman oleh otoritas Israel di wilayah pendudukan. Penolakan Israel terhadap hasil perundingan yang baru saja dilakukan menunjukkan bahwa Prancis gagal untuk membawa konflik ini pada penyelesaian sehingga dibutuhkan gaya yang baru untuk membuat Israel dan Palestina dapat duduk dan berdialog bersama.

Selain Prancis, negara-negara lain pun pernah berinisiatif dan bersedia menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi perdamaian, seperti Amerika Serikat, Spanyol, Lebanon dan Uni Soviet sebelum pecah. Selain itu, Amerika Serikat juga bergabung bersama Rusia, PBB dan Uni Eropa sebagai kesatuan yang sering disebut Kwartet untuk mendorong perdamaian konflik Israel-Palestina. Namun. Kwartet hingga saat ini terbukti belum dapat membantu Israel-Palestina.

Selain melihat konflik pelik berdasarkan tiga hal, Kriesberg membagi konflik pelik menjadi enam fase dari awal pengidentifikasi konflik hingga konflik selesai:

- 1) Erupsi konflik
- 2) Eskalasi konflik dengan kualitas destruktif

- 3) Kegagalan dalam penciptaan perdamaian
- 4) Penginstitutionan konflik yang destruktif
- 5) De-eskalasi yang mengarah pada transformasi konflik
- 6) Penghentian dan pemulihan dari konflik pelik

Jika dilihat berdasarkan enam fase konflik pelik dan sesuai dengan tiga hal penting yang ditekankan dalam konflik pelik, konflik Israel-Palestina berada pada fase yang ketiga, kegagalan dalam penciptaan perdamaian. Berdasarkan sejarah dan data yang diperoleh, eskalasi konflik masih mengalami dinamika hingga saat ini. Kondisi rakyat Israel dan Palestina yang tidak dapat hidup dengan tenang, banyaknya pengungsi serta korban jiwa dalam berbagai aksi menunjukkan bahwa dinamika eskalasi belum berhenti. Menanggapi hal tersebut, banyaknya inisiatif proses perdamaian baik melalui jalur resolusi atau pertemuan dan perjanjian belum dapat mendamaikan kedua belah pihak sejak bangsa Yahudi masuk ke wilayah Palestina.

Dalam fase yang keempat, de-eskalasi yang mengarah pada transformasi konflik, menunjukkan bahwa

upaya penyelesaian konflik pelik dapat dilakukan dengan menggunakan transformasi konflik. Transformasi konflik menunjukkan adanya keterlibatan dalam upaya perubahan yang sifatnya konstruktif dengan melampaui penyelesaian konflik itu sendiri. Untuk konflik Israel-Palestina, penyelesaian konflik harus lebih dari sekedar pemenuhan solusi damai. Menurut Lederach, konflik berdampak pada empat faktor kehidupan dan keempat faktor kehidupan tersebut yang harus mendapatkan perubahan sesuai dengan tujuan transformasi.

Aspek pertama adalah aspek personal. Aspek personal yang dimaksud adalah berkaitan dengan individu secara langsung, baik fisik, emosional, intelektual maupun spiritual. Konflik Israel-Palestina berkenaan langsung dengan kehidupan personal masyarakat Israel maupun Palestina. Terjadinya de-Palestinisasi membuat banyak rakyat Palestina kehilangan haknya sebagai rakyat bahkan kehilangan nyawanya. Secara fisik dan emosional rakyat Palestina mengalami tekanan atas berbagai aturan yang dibuat oleh otoritas Israel. Hal ini juga ditambah dengan berbagai keterbatasan yang harus mereka hadapi sebagai dampak dari

konflik, misalnya dengan adanya pembatasan wilayah sehingga mereka sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Adanya pembatasan wilayah ini menghambat kegiatan belajar pada anak-anak dan bekerja pada orang dewasa. Transformasi konflik harus dapat menyentuh aspek personal sehingga dapat mengembalikan aspek personal rakyat Israel dan Palestina pada kehidupan yang layak, tanpa tekanan fisik, emosional, intelektual dan spiritual.

Aspek kedua adalah aspek relasional. Aspek relasional yang dimaksud adalah berkaitan dengan fungsi komunikasi yang dapat mengembangkan kesepahaman bersama dan kerjasama untuk meningkatkan hubungan emosional dan penciptaan hubungan interdependensi. Hubungan yang dimiliki oleh rakyat Israel dan Palestina terpisahkan oleh pagar-pagar pembatas sehingga dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak ada komunikasi langsung antar kedua belah pihak. Pada tingkatan yang lebih tinggi, hubungan komunikasi antara kepala negara juga tidak terjalin. Jika komunikasi tidak dapat terbangun, jelas hubungan emosional dan hubungan interdependensi juga tidak dapat terbangun. Selain itu, peliknya konflik antara keduanya telah mengakar dan

berlangsung dalam jangka waktu yang panjang membuat hubungan emosional yang tercipta berdasarkan kenangan buruk masa lampau terhadap pendahulu mereka. Dalam transformasi konflik harus dapat membangun aspek relasional terutama dengan adanya komunikasi sehingga dapat menciptakan hubungan kerjasama dan interdependensi di kemudian hari.

Aspek ketiga adalah aspek struktural. Aspek struktural merupakan aspek yang membangun kehidupan itu sendiri seperti saling memahami terhadap konflik, mengedepankan mekanisme yang sama untuk mengurangi hingga mengakhiri kekerasan, serta pengembangan struktur yang adil. Kehidupan yang terjadi di Israel-Palestina memiliki dua sisi yang sangat berbeda, sisi Israel dan sisi Palestina sehingga pemahaman terhadap konflik itu sendiri berbeda. Israel melihat bahwa konflik yang dihadapi sekarang adalah bentuk perjuangan untuk pemenuhan haknya atas tanah airnya. Namun Palestina memahami konflik ini sebagai bentuk perjuangan pembelaan tanah airnya yang dijajah bangsa Yahudi. Dengan perbedaan pemahaman maka penggunaan mekanisme untuk menghadapi konflik ini juga berbeda, apalagi mekanisme untuk

pencapaian kehidupan yang adil. Dalam transformasi konflik, aspek struktural perlu mengalami transformasi agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak. Terciptanya keadilan ini berdasakan pada kesamaan pandangan terhadap konflik dan mekanisme penyelesaiannya.

Aspek keempat adalah kultural. Aspek kultural merupakan pemahaman budaya yang berpengaruh terhadap ekspresi kekerasan. Aksi kekerasan marak terjadi dalam konflik Israel-Palestina. Penggunaan kekerasan dinilai sebagai jalan yang perlu ditempuh oleh otoritas Israel sebagai bentuk yang paling efektif untuk mengatur rakyat Palestina. Dengan demikian, transformasi konflik harus dapat menjangkau aspek kultural dengan mengurangi budaya kekerasan sehingga kekerasan tidak dijadikan jalan untuk menangani konflik.

Dengan demikian, keempat aspek dalam transformasi konflik ini digunakan untuk mencapai sebuah kondisi damai. Damai merupakan sebuah situasi dimana terjadinya kondisi sosial yang harmonis. Bukan hanya mengedepankan keamanan dan hilangnya aksi kekerasan namun lebih kepada hubungan aktor yang terlibat didalamnya. Johan Galtung membagi damai menjadi dua, damai positif dan damai negatif. Untuk konflik Israel-

Palestina, damai yang pertama kali harus dicapai adalah damai negatif karena damai positif sifatnya penyempurnaan dari damai positif itu sendiri.

Maraknya aksi kekerasan, penolakan terhadap masing-masing pihak, adanya tindakan eksploitatif, adanya struktur serta budaya kekerasan menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus dihilangkan dan diatasi untuk menciptakan damai negatif dalam kehidupan rakyat Israel dan Palestina. Untuk mencapai kondisi damai ini, Galtung menggunakan pendekatan *transcend* yang berdasarkan pada transformasi konflik. Yang dimaksud dengan dasar transformasi konflik adalah penggunaan cara-cara yang melampaui penyelesaian konflik itu sendiri. Pendekatan *transcend* mengepankan pentingnya kreatifitas dalam berdialog antar pihak-pihak yang mengalami konflik. Tiga tahap yang harus dilakukan untuk melakukan metode dialog untuk transformasi konflik (Christie, dkk, 2001: 2012-2014) adalah:

- 1) Memahami transformasi konflik
- 2) Hasil yang berkelanjutan
- 3) Kerjasama dan kebersamaan

Untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, masing-masing pihak harus menyadari pentingnya pemahaman

akan transformasi konflik seperti pada tahapan pertama. Dengan pemahaman akan transformasi konflik maka proses perdamaian yang selama ini telah dilaksanakan tidak hanya selesai pada tercapainya kesepakatan antara keduabelah pihak namun hubungan yang terjalin setelah proses perdamaian tersebut terlaksana. Berdasarkan data yang diperoleh berkaitan kondisi masing-masing pihak terdapat pemahaman masing-masing akan konflik yang terjadi sehingga menyebabkan tidak terwujudnya kesepakatan bersama terhadap konflik yang dihadapi. Jika dalam tahap pertama, yaitu untuk memahami transformasi konflik tidak dapat dilaksanakan maka proses ini berhenti pada tahap yang pertama.

Peliknya konflik Israel-Palestina membuat pentingnya kehadiran aktor lain untuk membantu mewujudkan proses perdamaian. Dalam keterlibatan Pemerintah Indonesia pada konflik Israel-Palestina diperlukan sebuah ikatan pada keduabelah pihak. Ikatan tersebut adalah *trust* yang harus terbangun antara Indonesia dengan Israel dan Indonesia dengan Palestina. Jika hubungan *trust* sudah terbangun antara Israel dan Palestina maka proses perdamaian dan transformasi konflik dapat dilaksanakan

namun pada kenyataannya kedua negara belum memiliki ikatan *trust* satu dengan yang lainnya. Dengan demikian untuk menjalankan proses perdamaian dan untuk terlibat di dalamnya, Pemerintah Indonesia perlu memiliki ikatan *trust* dengan masing-masing pihak.

Hubungan Indonesia dengan Palestina sudah memiliki *mutual trust* yang dibuktikan dengan adanya hubungan diplomatik dan kerjasama dalam berbagai bidang. Selain itu dukungan politik dan moral yang selalu diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan untuk mendukung kemerdekaan dan perjuangan rakyat Palestina merupakan bentuk *trust* yang terjalin antara Indonesia dengan Palestina. Hubungan keduanya didukung dengan adanya hubungan diplomatik antara keduanya. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia dapat disampaikan secara langsung. Seperti data yang telah diperoleh, menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan, politik dan penguatan kapasitas dilakukan secara langsung dan hampir tanpa hambatan terhadap Palestina. Bantuan kemanusiaan sebagai reaksi cepat tanggap terhadap berbagai aksi kekerasan yang menimpa Palestina dapat dapat dengan mudah tersalurkan

dan terkomunikasikan. Selain itu juga bantuan yang diberikan dalam bentuk penguatan kapasitas untuk mempersiapkan kemerdekaan Palestina terus dilakukan dengan mengundang negara lain seperti Jepang melalui kerangka CEAPAD, NAASP dan KSST.

Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah Indonesia juga mendukung Palestina melalui organisasi internasional dan gerakan internasional. Dengan jalur diplomasi, Pemerintah Indonesia selalu mengajak negara-negara anggota PBB, OKI, GNB, dan ASEAN untuk terus ingat dan memberikan perhatian pada peristiwa yang terjadi di Palestina. Selain untuk memberikan perhatian, Pemerintah Indonesia juga kerap kali mendorong negara-negara lain untuk mewujudkan aksi nyata membantu pengakhiran penjajahan di Palestina. Hal ini dilakukan Pemerintah Indonesia seturut dengan tujuan nasional seperti yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan keempat yaitu untuk turut menghapuskan penjajahan di atas dunia dan turut serta menjaga ketertiban dunia.

Diplomasi-diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia ini sesuai dengan fungsi umum diplomasi yang dikemukakan oleh Morgenthau. Salah

satu fungsi diplomasi yang dimaksud adalah diplomasi harus menentukan tujuan sesuai dengan kekuatan dan potensi kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut. Aksi-aksi diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia, baik secara langsung maupun dalam wadah organisasi dan gerakan internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina sesuai dengan tujuan negara dan dalam porsi kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia mengetahui sejauh mana dapat bertindak untuk kepentingan Palestina dalam koridor yang sesuai dengan tujuan kepentingan nasional Indonesia.

Selain itu, diplomasi juga berfungsi untuk menilai kekuatan dan potensi kekuatan negara lain untuk mencapai tujuannya. Dengan adanya hubungan diplomatik dan kerjasama dengan Palestina, Indonesia dapat mengukur kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh Palestina sehingga bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia tidak sia-sia. Perlu disadari juga bahwa bantuan dan dukungan yang diberikan pada Palestina harus sesuai dengan kondisi negara dalam kerangka mendukung proses perdamaian. Bukan hanya bantuan-bantuan kemanusiaan dan dukungan untuk mempersiapkan

kemerdekaannya, namun juga yang berkaitan dengan upaya membuat Palestina menjadi sebuah negara yang solid dan tidak terpecah-pecah. Dengan adanya bantuan-bantuan yang sifatnya rekonsiliasi internal Palestina maka segala usaha yang dilakukan Pemerintah Indonesia dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Dibukanya Konsulat Kehormatan di Ramallah pada awal tahun 2016 menjadi pemenuhan fungsi dasar kehadiran diplomat sebagai perwakilan Indonesia di Palestina walaupun masih belum sempurna. Kehadiran Pemerintah Indonesia sebelumnya hanya dapat ditampakkan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Jordan sehingga berbagai hal yang berkaitan dengan Palestina dikendalikan melalui Jordan. Namun kini fungsi representasi simbol, representasi hukum dan representasi politik telah terbangun antara Indonesia dan Palestina. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina belum dapat dibangun karena alasan pendudukan Israel atas Palestina namun niat baik tersebut tidak dapat ditutupi. Dibukanya Konsulat Kehormatan menjadi salah satu simbol bahwa jalinan politik kedua negara berjalan dengan baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa warga

negara Indonesia yang berada disana akan mendapatkan perlindungan hukum Indonesia selayaknya warga negara Indonesia di negara-negara lain.

Berbeda dengan kondisi di Palestina, kehadiran Kedutaan Besar Palestina untuk Republik Indonesia yang sepenuhnya ditopang oleh Pemerintah Indonesia merupakan sebuah bentuk hubungan *trust* yang kuat dan tidak dapat dipungkiri. Sejak berdirinya hingga kini, Pemerintah Indonesia selalu memberikan dukungan tiada henti terhadap Pemerintah Palestina terutama dalam hal politik antara kedua negara. Keterbukaan Pemerintah Indonesia terhadap Palestina membuat tiga fungsi dasar hadirnya diplomat Palestina di Indonesia dapat terpenuhi.

*Trust* yang muncul juga disebabkan karena adanya dukungan secara moral yang terus-menerus diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam berbagai forum internasional, baik dalam organisasi, gerakan ataupun pertemuan dan konferensi internasional. Dalam berbagai kesempatan Pemerintah Indonesia tidak pernah berhenti menyuarakan dukungannya bagi rakyat Palestina. Dalam upaya ini, Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan solidaritas, terutama negara-negara

Muslim, untuk peduli dan tidak melupakan peristiwa yang sedang dihadapi Palestina. Pemerintah Indonesia tidak hanya membangun *trust* dengan Palestina namun juga dengan negara-negara lain untuk mau bahu-membahu berusaha mendorong perdamaian bagi Israel dan Palestina.

Bentuk *preventive diplomacy* dijalankan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah Palestina melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan eskalasi konflik meningkat. Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan negara lain memberikan dukungan pada Palestina untuk menempuh jalur non-kekerasan dengan mengadakan konferensi dan berbagai pertemuan untuk membahas mengenai penyelesaian konflik dan pencapaian solusi dua negara.

Untuk mendukung kemerdekaan Palestina demi tercapainya solusi dua negara Pemerintah Indonesia juga mendukung melalui jalur-jalur yang lain. Model diplomasi multi-jalur yang diperkenalkan oleh John W. Mc.Donald dilaksanakan oleh Indonesia dengan dukungan dari Pemerintah. Jalur utama diplomasi, jalur pemerintahan secara jelas dilaksanakan melalui hubungan diplomatik. Jalur-jalur lain seperti melalui

elemen lembaga swadaya masyarakat dan kalangan professional, pelaku bisnis, masyarakat, badan pelatihan dan pendidikan, aktivis, agama, pendanaan hingga jalur komunikasi dengan menggunakan media telah dilaksanakan oleh Indonesia. Terbangunnya Rumah Sakit Indonesia, pemberian insentif ekonomi, hingga pemanfaatan media untuk meningkatkan kepedulian terhadap rakyat Palestina merupakan hasil dari gabungan jalur-jalur diplomasi. Dalam mendukung Palestina, Pemerintah Indonesia beserta elemen-elemen lainnya telah mendukung pencapaian perdamaian di Palestina yang juga sesuai dengan kepentingan negara Indonesia.

Setelah menguraikan keterlibatan pemerintah Indonesia dalam proses perdamaian konflik Israel-Palestina maka perlu diketahui pula kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia di dalam keterlibatannya tersebut. Dalam memahami konflik dan proses perdamaiannya, satu hal yang harus ada adalah keinginan dari kedua belah pihak yang berkonflik untuk mengakhiri konflik. Kelman menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat masuk dalam proses damai tanpa adanya kesamaan tingkat kepercayaan, namun kepercayaan juga tidak dapat terbangun tanpa adanya

proses perdamaian. Selain itu, Kelman juga menegaskan bahwa proses perdamaian mungkin terlaksana jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan negosiasi sesuai dengan kepentingannya masing-masing untuk mengakhiri konflik. Jadi kepercayaan atau *trust* dan keinginan merupakan dua elemen penting untuk membangun sebuah proses perdamaian.

Hubungan yang terjalin antara Israel dan Palestina saat ini jauh dari apa yang dikemukakan oleh Kelman. Tidak ada *trust* dan tidak ada keinginan untuk menyelesaikan konflik. Proses perdamaian tidak pernah berhenti diadakan untuk mendukung penyelesaian konflik kedua negara. Berbagai negara, termasuk Indonesia, terlibat dalam berbagai proses perundingan, perjanjian dan konferensi yang sifatnya ingin mewujudkan perdamaian melalui solusi dua negara. Namun, kembali lagi, proses perdamaian dapat berjalan dengan adanya *trust* dan keinginan dari Israel dan Palestina untuk menyelesaikan konflik yang tidak tampak saat ini.

Keinginan dan *trust* tersebut pernah ada ketika Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin memimpin masing-masing negara, namun tidak berlangsung lama. Keinginan dan *trust* saat ini terbentur

oleh masing-masing pemimpin. Pemerintahan Mahmoud Abbas lemah karena dinamika konflik internal antara Hamas dan Fatah, sedangkan pemerintah Israel keras dalam pembuatan kebijakan dan tanpa kompromi. Hal inilah yang menyebabkan kedua pemimpin tidak dapat bertemu dan melakukan dialog. Masing-masing memiliki tekanan dan kehendak yang tidak dapat dinegosiasikan.

Dalam konsep transformasi konflik, elemen utama untuk penyelesaian konflik pelik adalah dengan kreatifitas dialog. Fakta dilapangan menunjukkan aktivitas dialog jauh dari kenyataan. Faktornya karena ketiadaan keinginan dan *trust* diantara Israel dan Palestina sehingga proses perdamaian menjadi sulit untuk dilaksanakan. Proses perdamaian terakhir yang dilaksanakan oleh Perancis tidak mengundang kedua belah pihak untuk terlibat, namun diperkenankan untuk mendengarkan kesimpulan. Praktek ini tidak sesuai dengan metode *transcend* untuk transformasi konflik yang menekankan perlunya keterlibatan kedua belah pihak secara langsung.

Proses perdamaian mungkin saja dapat terlaksana dengan adanya keterlibatan pihak lain seperti Amerika

Serikat yang berada ditengah-tengah Israel dan Palestina dalam *Oslo Agreement* namun harus ada *mutual trust* diantara ketiganya. *Mutual trust* dapat terbangun dengan adanya pengaruh dan kedekatan masing-masing negara. Amerika Serikat mampu berdiri pada posisi itu karena kondisi negaranya yang merupakan negara dengan kekuatan yang besar. Namun *mutual trust* sendiri juga dapat terbangun melalui hubungan diplomatik antar-negara.

Melihat posisi Indonesia dalam kasus ini, Indonesia bukan negara dengan kekuatan besar dan secara geografis terletak jauh dari lokasi konflik. Selain itu *trust* yang ditunjukkan melalui hubungan diplomatik hanya dapat dilihat dari sisi hubungan Indonesia dengan Palestina. Indonesia dengan Palestina memiliki ikatan yang kuat karena sejarah yang panjang antara kedua negara. Namun tidak dengan Israel. Walaupun Indonesia memiliki hubungan kerjasama dan bisnis, namun terkendala oleh ketiadaan hubungan diplomatik. Sehingga dalam prosesnya masih memerlukan negara ketiga untuk menjadi perantara. Minimnya *trust* antara Indonesia dengan Israel menjadi salah satu kendala keterlibatan Indonesia pada proses

perdamaian Israel-Palestina karena aksinya menjadi sangat terbatas.

Ketiadaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel menjadi kendala untuk melakukan hubungan diplomasi dalam bentuk apapun karena tidak adanya legalitas formal bagi keduabelah pihak untuk melakukan interaksi, termasuk Pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan *preventive diplomacy* yang diharapkan dapat menjadi salah satu sarana mencegah terjadinya eskalasi konflik antara Israel dan Palestina.

Fungsi umum diplomasi yang dikemukakan oleh Morgenthau tidak dapat diaplikasikan pada hubungan Indonesia dengan Israel. Salah satu fungsi diplomasi itu adalah diplomasi harus dapat menentukan perbedaan tujuan dan bagaimana perbedaan tersebut dapat saling disesuaikan. Salah satu tujuan kepentingan nasional Indonesia adalah penghapusan penjajahan diatas dunia sesuai dengan yang tertulis dalam alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Indonesia, tindakan yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan sebuah bentuk penjajahan dan menurut Indonesia harus dihapuskan. Hal ini juga yang menjadi landasan Indonesia untuk menentukan

sikap terhadap Israel, tidak akan membuka hubungan diplomatik hingga rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya. Tindakan yang dilakukan oleh Israel, menurut mereka, adalah pemenuhan haknya atas seluruh tanah di Palestina yang mereka percayai sebagai tanahnya. Segala tindakan yang dilakukan Israel untuk pemenuhan tujuannya itu menjadi sebuah bentuk penjajahan terhadap Palestina.

Selain itu, fungsi diplomasi juga menunjukkan bahwa diplomasi harus dapat menentukan cara-cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan perbedaan tujuan diplomasi antara Indonesia dengan Israel maka cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan jelas tidak dapat diwujudkan. Disinilah tampak perbedaan tujuan antara Indonesia dengan Israel dalam fungsi diplomatik sehingga hubungan diplomatik antara keduanya tidak dapat dijalankan.

Kehadiran Pemerintah Indonesia dalam berbagai organisasi, gerakan, forum internasional selalu menyuarakan kepentingan rakyat Palestina. Walaupun dalam kesempatan itu tidak banyak hasil berupa aksi nyata yang dapat mewujudkan proses perdamaian karena sifat organisasi, gerakan dan

forum itu yang tidak mengikat secara hukum. Dan dalam banyak kesempatan, untuk mendukung Palestina, Indonesia sering kali berposisi yang bellawanan dengan Israel sehingga semakin menimbulkan jarak antara keduanya.

Dalam keterlibatannya pada PBB, Indonesia seringkali terkalahkan oleh Amerika Serikat yang hampir selalu dalam tiap kesempatan memberikan dukungan dan berpihak pada Israel. Upaya diplomasi seruan-seruan yang dilakukan Indonesia terkalahkan oleh hak veto yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Dukungan yang diharapkan dapat diperoleh dari negara-negara Muslim lainnya untuk mendukung Palestina seringkali tidak terwujud dengan mudah karena perbedaan kepentingan antar-negara dalam memandang konflik ini.

### **Kesimpulan**

Melalui uraian di atas, apabila dilihat berdasarkan asal penyebab konfliknya, konflik Israel-Palestina merupakan konflik pelik yang terjadi karena perebutan wilayah setelah bangsa Yahudi melalui gerakan zionisme masuk ke tanah Palestina. Terdapat enam isu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, yaitu pengungsi, pemukiman, air, status Jerusalem, batas wilayah dan keamanan.

Selain itu lemahnya pemerintah masing-masing karena kondisi Palestina yang terpecah dalam beberapa organisasi dan kondisi Israel yang dipimpin seorang pemimpin yang *hawkish* menambah rumit konflik ini. Kompleksitas konflik ini menjadikan konflik Israel-Palestina dapat dikategorikan menjadi konflik pelik.

Konflik menjadi lebih kompleks dan rumit karena telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat masing-masing Negara sehingga mempersulit proses pencapaian perdamaian. Untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina tidak hanya dilakukan dengan pencapaian solusi damai namun diperlukan transformasi konflik yang sifatnya konstruktif hingga melampaui solusi damai itu sendiri. Transformasi konflik harus dapat menyentuh hubungan personal, relasional, struktural dan kultural masing-masing pihak. Namun untuk melakukan transformasi konflik, hal utama yang harus diperhatikan adalah adanya kesadaran dan kesamaan pemahaman dari Israel dan Palestina untuk mengakhiri konflik. Kesadaran dan kesamaan pemahaman itu yang belum terlihat hingga kini dan menyebabkan konflik terus berlarut dan sulit mencapai kesepakatan damai. Hal ini menyebabkan

pentingnya pihak lain untuk terlibat dalam membantu mewujudkan proses perdamaian, termasuk Pemerintah Indonesia.

Sesuai dengan amanat konstitusi negara Indonesia, Pemerintah Indonesia menentukan sikap untuk memberikan dukungan penuh terhadap Palestina. Dukungan tersebut diberikan dalam rupa dukungan politik, dukungan kemanusiaan dan peningkatan kapasitas. Berbagai dukungan ini diberikan dalam kedudukan Indonesia sebagai sebuah negara mandiri yang berdaulat dan negara yang terlibat dalam berbagai organisasi internasional dan gerakan. Sikap dan dukungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ini telah menunjukkan *mutual trust* antara Indonesia dengan Palestina.

Dukungan politik diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam negosiasi dan diplomasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Palestina. Berbagai seruan dan pernyataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan berisi dukungan dan ajakan untuk membantu Palestina. Termasuk dalam berbagai organisasi internasional seperti PBB dan OKI serta GNB, Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk aktif dan berinisiatif

mendukung terciptanya resolusi dan kebijakan yang berpihak pada Palestina. Salah satu dukungan nyata secara politik yang diberikan adalah dengan dibukanya Konsulat Kehormatan di Ramallah pada 2016. Lebih lanjut, dukungan kemanusiaan diberikan dalam bentuk bantuan-bantuan nyata yang dapat meringankan penderitaan rakyat Palestina. Bantuan kemanusiaan diberikan dalam rupa pembangunan fasilitas rumah sakit, pemberian obat-obatan, dan juga pendonasian sejumlah uang untuk kepentingan kemanusiaan.

Sedangkan peningkatan kapasitas diberikan dalam berbagai bidang untuk mempersiapkan negara Palestina yang merdeka. Peningkatan kapasitas ini diberikan dengan cara bilateral ataupun trilateral yang melibatkan negara lain sebagai pemberi donor terlaksananya berbagai pelatihan. Selain itu, melalui kerangka CEAPAD, NAASP dan KSST, dukungan peningkatan kapasitas dilaksanakan melalui pelatihan dalam berbagai bidang dan untuk berbagai lapisan masyarakat seperti: pelatihan dalam bidang kepolisian dan forensik, energi dan ekonomi, tata kelola pemerintahan dan diplomasi, pariwisata dan konstruksi, dan lain sebagainya.

Bersama-sama dengan negara lain, Pemerintah Indonesia berusaha menggalang dukungan untuk menyuarkan hak-hak rakyat Palestina. Dengan menggunakan *preventive diplomacy*, Pemerintah Indonesia mengupayakan untuk terus menyuarkan pentingnya pencapaian solusi dua negara agar eskalasi konflik Israel-Palestina tidak meningkat dan menggunakan kekerasan. Pemerintah Indonesia juga menggunakan model diplomasi multi-jalur yang tidak hanya melibatkan pemerintah, namun juga pemanfaatan elemen lain dalam negara untuk mencapai kepentingan perdamaian di Palestina.

Walaupun sejumlah dukungan dalam berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia namun keterlibatan Pemerintah Indonesia mengalami keterbatasan karena sejumlah kendala. Salah satu kendala utamanya adalah ketiadaan kesadaran dan kesepahaman untuk pengakhiran konflik dari Israel dan Palestina sehingga sulit dicapai kesepakatan damai. Selain itu Pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan *trust* dengan Israel yang dibuktikan dengan tidak adanya hubungan diplomatik antara kedua negara. Hal ini menghambat keterlibatan Pemerintah Indonesia karena *trust* merupakan elemen penting untuk

membangun proses perdamaian. Ketiadaan hubungan diplomatik juga mengakibatkan Pemerintah Indonesia tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi diplomatik terhadap Israel.

Kehadiran Pemerintah Indonesia dalam berbagai forum dan organisasi internasional juga tidak membuahkan hasil yang signifikan karena organisasi dan forum tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Banyaknya kesepakatan yang dicapai tanpa aksi konkret membuat hasil kesepakatan menjadi sia-sia belaka. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kepentingan bersama dalam organisasi-organisasi yang diharapkan dapat membantu mencapai solusi dua negara. Selain itu, dengan kesadaran bahwa Indonesia bukan negara dengan kekuatan yang besar, seringkali berseberangan dengan negara besar seperti Amerika Serikat dalam isu-isu yang sifatnya membela hak-hak rakyat Palestina. Pemerintah Indonesia juga seringkali terbendung dengan adanya hak veto yang dimiliki oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB sehingga seruan Pemerintah Indonesia menjadi tidak ada artinya.

## Daftar Pustaka

### Buku, Jurnal Ilmiah dan Artikel

- Adam, K, dkk. (2015). *Time for a Change: The Role of the United States in the Israeli-Palestinian Conflict*. Rockefeller Center for Public Policy: Dartmouth College.
- Bar-Simon-Tov, Y. (2010). *Barriers to Peace in the Israeli-Palestinian Conflict*. The Jerusalem Institute for Israel Studies: Jerusalem.
- Barston, R.P. (1997). *Modern Diplomacy*. New York: Longman.
- Basyuni, M.M. (2016). *Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Timur Tengah (Kasus Konflik Israel-Palestina)*. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Djelantik, S. (2008). *Diplomasi: Antara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Castro, L. N dan Jasmin Nario Galace. (2008). *Peace Education: A Pathway To A Culture of Peace*. Miriam College: Quezon City.
- Christie, D. J, dkk. (2001). *Peace, Conflict, and Violence: Peace Psychology for the 20th Century*. Practice Hall: New Jersey.

- Coleman, P. T, dkk. (2016). *Handbook Resolusi Konflik*. Nusa Media: Bandung.
- Cook-Huffman. (2009). *Handbook of Conflict Analysis and Resolution: The role of identity in conflict*. Routledge: Oxon.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Denzin, N. K dan Y. S Lincoln. (1994). *Handbok of Qualitative Research*. Sage Publications: California.
- Francis, D. (2002). *People, Peace and Power: Conflict Transformation in Action*. Pluto Press: London.
- Hardita, I. (2010). *Grand Design Israel di Indonesia*. Penerbit Fadira: Jakarta.
- Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster Paperbacks: New York.
- Joesoef, D. (2014). *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Kompas: Jakarta.
- Kegley Jr, C. W dan Eugene R. Wittkopf. (2004). *World Politics: Trend and Transformation, 9th Edition*. Thomson Wadsworth: Belmont.
- Kelman, H.C. (2005). *Building Trust Among Enemies: The Central Challenge for International Conflict Resolution*, *International Journal of Intercultural Relations*. Massachusetts: Harvard University.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2014). *Dukungan Indonesia Untuk Palestina*. Kantor Staf Ahli Menlu Bidang Polhukam dan Direktorat Timur Tengah Kemlu RI: Jakarta.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *Rencana Strategis 2015-2019*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Jakarta.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: Jakarta.
- Khairi, A. G dan Amin Bukhari. (2009). *Air Mata Palestina*. Hi-Fest: Jakarta Timur.
- Kriesberg, L. (2005). *Grasping the Nettle: Analyzing Cases of Intractable Conflict*. United States Institute of Peace Press: Washington DC.
- Kumar, R. (1996). *Research Methodology: A Step-By-Step Guide for Beginners*. Sage Publications: London.

- Kuncahyono, T. (2011). *Jerusalem 33: Imperium Romanum, Kota Para Nabi, dan Tragedi di Tanah Suci*. Kompas: Jakarta.
- Kuncahyono, T. (2008). *Jerusalem: Kesucian, Konflik dan Pengadilan Akhir*. Kompas: Jakarta.
- Life & Peace Institute. (2009). *Conflict Transformation: Three Lenses in One Frame*.
- Mc. Donald, J. W. (2012). *The Institute for Multi-Track Diplomacy, Journal of Conflictology Vol.3, Issue 2*. Campus for Peace, Universitat Oberta de Catalunya.
- Miall, H. (2001). *Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task*. Research Center for Constructive Conflict Management.
- Muhammad, S.V. (2015). *Konflik Israel-Palestina dan Prospek Perdamaianya, Vol.VII*. Pusat Pengkajian, Peolahan Data dan Informasi (P3DI): Sekretariat Jenderal RI.
- Lederach, J. P. (1991). *Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press: Washington DC.
- Lederach, J. P. (2003). *The Little Book of Conflict Transformation*. Good Books: Intercourse, PA.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Morghentau, H. J. (1993). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. McGraw-Hill: USA.
- Galtung, J. (2000). *Conflict Transformation by Peaceful Means (the Trancend Method)*. United Nations Disaster Management Training Programme (DMTP).
- Spangler, E. (2015). *Understanding Israel/Palestina: Race, Nation, and Human Rights in the Conflict*. Sense Publisher: Boston.
- Sugiyono. (2006). *Statistika Untuk Penelitian*. CV Alfabeta: Bandung.
- Sujarweni, V.W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Trixie, B. (2014). *Inisiatif Diplomati Indonesia Sebagai Ketua ASEAN 2011 Dalam Mengelola Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja*. Universitas Pertahanan: Bogor.
- UN Secretary-General. (1992). *An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping*. UN Secretary-General.
- UNRWA. (2015). *In Figures*. Communications Division. UNRWA Headquarters: Jerusalem.

Webel, C. dan Johan Galtung. (2007). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. Routledge: New York.

**Wawancara:**

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penulisan Karya Akhir Studi di Universitas Pertahanan.

**Surat Kabar:**

Kompas. (15 Januari 2017). *Seotong Mimpi*.

Kompas. (16 Januari 2017). *Seruan untuk Trump di Paris*.

Kompas. (17 Januari 2017). *Dua-Negara Jadi Solusi Terbaik*.

Kompas. (17 Januari 2017). *Seruan Moral Politik dari Paris*.

Kompas. (20 Januari 2017). *Hati-hati Soal Jerusalem*.

Kuncahyono, T. (26 Desember 2016). *Palestina Rayakan Kemenangan*. Kompas.

Kuncahyono, T. (18 Januari 2017). *Dari Awal Mula (Bagian Pertama)*. Kompas.

Kuncahyono, T. (19 Januari 2017). *Internasionalisasi Status (Bagian Kedua)*. Kompas.

Kuncahyono, T. (20 Januari 2017). *Setelah Tahun 1967 (Bagian Ketiga)*. Kompas.

**Siaran Pers:**

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2015*.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2016). *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2016*.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2017). *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2017*.

**Internet:**

Amindoni, A. 2016. *Indonesia highlights Palestine issues during ASEAN-US Summit*. Diakses pada 25 Februari 2017 dari <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/16/indonesia-highlights-palestine-issues-during-asean-us-summit.html>

Berlianto. (2016). *Pembangunan Pemukiman Israel Naik 40%*. Diakses

- pada 26 Desember 2016 dari <http://international.sindonews.com/read/1139381/43/pembangunan-pemukiman-israel-naik-40-1473891313>
- Corradin, C. (2016). *Israel: Water as a Tool to Dominate Palestinians*. Diakses pada 26 Januari 2016 dari <http://www.aljazeera.com/news/2016/06/israel-water-tool-dominate-palestinians-160619062531348.html>
- Hendrajit. (2014). *Jejak-jeakan Kerjasama Tak Resmi RI-Israel di Bidang Pertahanan*. Diakses pada 15 Juli 2016 dari [http://www.theglobalreview.com/content\\_detail.php?lang=id&id=16845&type=8#.V47omPl97IW](http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=16845&type=8#.V47omPl97IW)
- NN. (2017). *Palestine Seeking Support from Indonesia, Asean*. Diakses pada 25 Februari 2017 dari <http://jakartaglobe.id/archive/palestine-seeking-support-from-indonesia-asean/>
- NN. (2016). *Indonesia Tegaskan Komitmen untuk Memajukan Proses Perdamaian Palestina-Israel*. Diakses pada 27 Desember 2016 dari [http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-Tegaskan-](http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-Tegaskan-Komitmen-untuk-Memajukan-Proses-Perdamaian-Palestina-Israel.aspx)
- [Komitmen-untuk-Memajukan-Proses-Perdamaian-Palestina-Israel.aspx](http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-Tegaskan-Komitmen-untuk-Memajukan-Proses-Perdamaian-Palestina-Israel.aspx)
- NN. (2016). *Indonesia Tegaskan Pentingnya Insentif Ekonomi dan Dukungan Kapasitas Kepada Palestina dalam Kerangka Proses Perdamaian di Timur Tengah*. Diakses pada 27 Desember 2016 dari <http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/?p=179>
- NN. (2016). *Isu Palestina*. Diakses pada 27 Desember 2016 dari <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Isu-Palestina.aspx>
- NN. *Primer on Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict*. Diakses pada 26 Desember 2016 dari <http://www.merip.org/primer-palestine-israel-arab-israeli-conflict-new>
- NN. (2016). *Rachmawati Bilang Indonesia-Israel Kerjasama Intelijen, Benarkah?*. Diakses pada 15 Juli 2016 dari <https://www.intelijen.co.id/rachmawati-bilang-indonesia-israel-kerjasama-intelijen-benarkah/>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2016). *Wapres JK Kampanyekan Pencalonan*

*Indonesia sebagai Anggota DK PBB.*

Diakses pada 28 Desember 2016

dari

<http://www.kemlu.go.id/newyork-un/en/siaran-pers/Pages/Wapres-JK-Kampanyekan-Pencalonan-Indonesia-sebagai-Anggota-DK-PBB.aspx>

UNRWA. (2016). *Where we work*. Diakses

pada 24 Desember 2016 dari

<https://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip>

UNRWA. (2016). *Where we work*. Diakses

pada 24 Desember 2016 dari

<https://www.unrwa.org/where-we-work/west-bank>



